TAJUK RENCANA

Utamakan Keselamatan Wisatawan

SEPERTI diprediksi, Lebaran tahun ini tempat wisata di DIY diserbu pengunjung, baik lokal maupun luar daerah. Jumlah pengunjung dipastikan meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya, karena pemerintah sudah mengizinkan warga untuk mudik, setelah dua tahun dilarang.

Konsekuensinya, tempat-tempat wisata di DIY diserbu pengunjung, apalagi setelah sekian lama mereka tidak berwisata. Fenomena ini sering kita kenal dengan istilah 'Revenge Tourism', yakni balas dendam untuk berwisata setelah sebelumnya terkekang selama dua tahun akibat pandemi Covid-19.

Sejauh mana pengelola tempat wisata di DIY mengantisipasi 'Revenge Tourism' ? Inilah yang hendak kita ingatkan, jangan sampai mereka hanya fokus pada pemasukan pendapatan, tapi mengabaikan keselamatan pengunjung. Keselamatan di sini tentu bukan hanya terkait nyawa, tapi juga aspek kesehatan, yakni agar pengunjung aman tidak terpapar Covid-19.

Meski secara nasional tren kasus Covid-19 menurun, tapi pandemi belum berakhir. Informasi yang berseliweran di media sosial (medsos) bahwa pandemi telah berakhir terbukti hanyalah hoaks, sehingga jangan dipercaya. Yang benar, kita sedang menuju transisi menuju endemi yang artinya pandemi belum berakhir.

Dengan kata lain, potensi penularan masih tetap ada, sehingga perlu kehati-hatian, antara lain dengan cara disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes), termasuk di setiap kunjungan ke destinasi wisata. Kita akui, di sejumlah destinasi wisata DIY pengelola menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai skrening awal pengunjung. Sayangnya, tidak semua objek wisata menerapkannya, bahkan ada yang belum dilengkapi dengan aplikasi PeduliLindungi.

Ironisnya, ada tempat wisata yang sudah dilengkapi dengan aplikasi PeduliLindungi namun malah tidak digunakan. Pengunjung bebas masuk tanpa skrening. Inilah yang mesti kita ingatkan, agar petugas di pintu masuk objek wisata melakukan skrening pada pengunjung. Sebab, siapa tahu ada di antara pengunjung yang terpapar Covid-19 sehingga berpotensi menular ke orang lain.

Selain itu, pemerintah daerah harus memikirkan agar di setiap pintu masuk objek wisata tidak terjadi antrean panjang. Mengapa ? Karena, seperti kita tahu, kerumunan adalah salah satu titik rawan penularan Covid-19. Pemda, seperti yang digagas Pemda Sleman, sedang merintis penggunaan alat transaksi guna mencegah antrean di pintu masuk.

Apalagi, saat ini sudah dikembangkan sistem pembayaran nontunai sehingga lebih praktis, tanpa harus bertransaksi secara fisik. Hanya saja, untuk melakukan ini butuh aplikasi di smart phone yang tidak semua orang bisa mengaksesnya. Tapi, paling tidak, sudah ada upaya ke arah itu guna menghindari antrean orang.

Tak kalah penting, pengelola wisata harus menyediakan fasilitas pengamanan pengunjung. Sebab, di setiap destinasi wisata ada titik-titik rawan bagi pengunjung, seperti di kawasan Gunung Merapi, Kaliurang, Tebing Breksi, serta kawasan Pantai Selatan. Petugas harus memasang rambu-rambu bahaya di titik-titik rawan. Sebab, pengunjung bukan hanya butuh kenyamanan tapi juga keamanan atau keselamatan. ❑

Mempersiapkan Pemulihan Pendidikan

Rudy Prakanto

PERINGATAN Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) merupakan momentum penting bagi Bangsa Indonesia untuk merefleksikan perjalanan pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar menuju masyarakat sejahtera dan sekaligus mewujudkan Indonesia maju. Cita-cita tersebut tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945, negara berkeinginan untuk 'memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa'. Keinginan luhur tersebut tidak akan sepenuhnya tercapai apabila tidak didukung dengan sistem pendidikan yang baik.

Tema Hardiknas tahun 2022 adalah 'Pimpin Pemulihan, Bergerak untuk Merdeka Belajar', merupakan ajakan seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan, melakukan pemulihan dari Covid-19. Sehingga kondisi pendidikan di Indonesia tetap berkualitas, relevan dengan konteks kehidupan di masa kini dan masa depan siswa.

Peringatan Hardiknas sangat tepat untuk mengevaluasi praksis pendidikan nasional. Sudah seberapa jauh pendidikan di Indonesia melahirkan sumber daya manusia (SDM) unggul, cerdas, berkarakter, adaptif dan tangguh menghadapi perubahan jaman yang kian dinamis?

KR-JOKO SANTOSO

Potret Pendidikan

Persoalan pendidikan di Indonesia sebenarnya tidak jauh dari 4 isu utama yaitu; akses, pemerataan kualitas, relevansi, dan tata kelola pendidikan. Empat persoalan ini menjadi semakin berat dengan terjadinya Covid-19. Karenanya sangat tepat untuk dilakukan proses pemulihan. Tentu tidaklah mudah untuk merancang, dan melaksanakan pemulihan setelah lebih dari 2 tahun dihantam Covid-19 tersebut.

Permasalahan pertama, menyangkut akses pendidikan dimasa Covid-19 banyak siswa mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, karena ketiadaan sarana untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sehingga potensi anak putus sekolah cukup tinggi. Disamping itu kesulitan ekonomi orang tua juga menjadi faktor yang lainnya.

Kedua, terkait kualitas pendidikan, dari berbagai survei, kualitas pendidikan kita relatif stagnan 10 tahun terakhir. Terlihat hasil PISA 2018, Indonesia berada pada urutan 74 dari 79 negara yang mengikuti program ini. Permasalahan kualitas pendidikan menjadi semakin nyata dimasa Covid-19, terutama antara di perkotaan dan di pedesaan. Disparitas kualitas pendidikan yang sangat lebar antar daerah pun terjadi. Penyelesaian sistematis dan komprehensip perlu menjadi prioritas.

Ketiga, berkaitan relevansi pendidikan, permasalahan yang ditemukan adanya ketidaktepatan (*mismatch*) antara lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Pemulihan relevansi pendidikan, ditujukan agar outputnya lebih berorientasi pada pemenuhan dunia usaha, industri dan kerja (dudika). Relevansi proses pendidikan perlu diarahkan agar peserta didik di tingkat pendidikan menengah terutama kejuruan.

Keempat, berkaitan tata kelola pendidikan perlu adanya sinkronisasi di tingkat pusat maupun daerah yang kadang masih tumpang tindih. Apa saja tata kelola yang menjadi kewenangan pusat, daerah dan kabupaten/kota, harus jelas dan pasti.

Langkah Sistematis

Memperhatikan masih adanya berbagai persoalan pendidikan di Indonesia, pada situasi masih adanya Covid-19 ini, proses pemulihannya perlu dirumuskan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Muaranya ingin tetap mewujudkan SDM Indonesia berkualitas. Untuk itu, diperlukan adanya peta jalan pemulihan pendidikan (PJPP) di tingkat nasional maupun daerah.

PJPP ini merupakan rencana strategis yang memiliki output, capaian dan dampak termasuk di dalamnya langkah utama dan/atau tonggak capaian terhadap pemulihan kualitas pendidikan di Indonesia pasca Covid-19. PJPP memiliki tujuan jelas dan terarah, bagaimana memulihkan kualitas pendidikan nasional, ditopang oleh pemulihan kualitas pendidikan di setiap daerah.

Penyusunan PJPP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi keharusan. Sehingga arah pemulihan dan memajukan pendidikan semakin pasti. PJPP memberikan arah kebijakan pemulihan pendidikan untuk jangka panjang. Tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan karakteristik wilayahnya.

Pemulihan pendidikan yang bersifat menyeluruh terintegrasi antar daerah, diharapkan dapat mengembalikan kualitas pendidikan di Indonesia pasca-covid-19. ❑

***) Rudy Prakanto SPd Meng**, Kepala Balai Dikmen Kulonprogo dan Kepala Biro Organisasi dan Kaderisasi PGRI DIY*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

'May Day, May We Come Back Stronger'

Nindry S Widiastiani

MAY Day atau hari buruh internasional merupakan momentum penting yang selalu diperingati dengan khidmat oleh buruh sedunia, termasuk buruh Indonesia. Hangatnya kobaran semangat May Day tak jarang terasa selama satu bulan Mei penuh, tak hanya 1 Mei saja. May Day tahun ini terasa special. Tidak hanya dekat dengan hari kemenangan Idul Fitri. Namun saat ini mulai masuk pada masa transisi kenormalan baru di tempat kerja pascakeadaan dua tahun pandemi covid-19 yang carut marut.

Istimewanya momentum May Day tahun ini hendaknya direfleksikan dengan sudut pandang yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumya perjuangan lebih fokus pada hak-hak buruh dari poin satu ke poin yang lainnya, maka kali ini diarahkan kepada gambaran yang lebih *general*. Tak lain adalah pada keberadaan UU Cipta Kerja yang hingga kini menjadi momok utama dalam hukum perburuhan Indonesia.

November lalu, pada ulang tahun pertama UU Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat melalui putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pada amar putusannya, MK memberikan tenggang waktu 2 tahun bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Jika tak diperbaiki, UU Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional permanen dan peraturan perundangan yang sebelumnya telah dicabut akan diberlakukan kembali. Dengan adanya situasi yang demikian, momentum May Day tahun ini hendaknya digunakan sebagai tonggak bagi kita semua untuk mengingatkan semua pihak pentingnya mengawal proses perbaikan UU Cipta Kerja agar tidak kalah dan tenggelam dengan isu-isu lainnya. Padahal UU Cipta Kerja merupakan aturan payung utama dalam hukum perburuhan Indonesia.

Hal ini menjadi penting agar proses perbaikan UU Cipta Kerja tidak hanya bertitik berat pada formalitasnya saja. Tetapi juga penting untuk dimanfaatkan ke arah perbaikan substansinya. Sebagaimana diketahui bahwa UU Cipta Kerja banyak mengatur substansi yang justru tidak lebih baik dari aturan undang-undang sebelumnya dan merugikan buruh. Misalnya terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (*outsourcing*), penggantian formula penetapan upah minimum yang tidak mementingkan komponen kebutuhan hidup layak, penghapusan upah minimum sektoral yang nominalnya lebih tinggi dibanding upah minimum provinsi, dan persoalan kompensasi PHK seperti pesangon. Subtansi yang merugikan tersebut mestinya dilakukan pengkajian ulang dengan gagasan utama bahwa 'untuk apa mengubah suatu aturan apabila aturan yang baru justru tidak lebih baik dari aturan yang lama?'.

Di sisi lain, berkaca dari terjadinya carut marut selama situasi pandemi covid-19, perbaikan substansi ini juga dapat diarahkan untuk mengakomodasi bagaimana hukum perburuhan Indonesia menghadapi situasi genting yang demikian itu. Hal ini belum terdapat panduannya pada aturan manapun, padahal sebagaimana yang kita ketahui kondisi buruh sepanjang dua tahun belakangan ini sangat memprihatinkan.

Momentum May Day ini berdekatan dengan hari raya Idul Fitri. Meski agak terlambat, namun momentum ini masih diperlukan untuk mengawal pemenuhan hak buruh berupa Tunjangan Hari Raya (THR). Setelah dua tahun pandemi covid-19 penuh simpang siur pemenuhan THR buruh lalu, tahun ini dapat dijadikan tonggak untuk dimulainya masa 'kenormalan pemenuhan' hak-hak buruh melalui langkah pertama : pembayaran THR tersebut.

Momentum *May Day* tahun ini marilah dijadikan sebagai waktu refleksi bagi kita semua untuk kembali menjadi lebih kuat di masa kenormalan baru hubungan kerja ini. *May Day: May We Come Back Stronger!* Selamat Hari Buruh, *Together We Can Grow!* ❑

***) Nindry S Widiastiani SH MH,** penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Melihat 'Keanehan' Magelang

MESKI tidak dilahirkan dan tinggal di Magelang, namun saya memiliki keterikatan kuat dengan kota sejuk ini. Paling tidak, kedua orang tua saya berasal dari Kota Magelang. Hanya setelah lulus kuliah dan tidak lagi ada kakek nenek membuat saya hampir jarang ke Magelang.

Mungkin sudah sekitar 4 tahun saya tidak silaturahmi ke Magelang. Namun Idul Fitri 1443H ini saya berkesempatan ke Magelang karena anak-anak kepengin melihat Candi Borobudur.

Pertama perjalanan dari Lubuklinggau menuju Bandung dulu. Dari Bandung ke Yogya dan kemudian baru ke Magelang. Ketika berbelok menuju ke Borobudur itu saya merasakan 'keanehan' dan terus kepikiran sampai ke Borobudur. Barulah dalam perjalanan menuju Kota Magelang saya paham. 'Keanehan' dan menurut saya ketidaktepatan itu terdapat pada 'gerbang baru' Kawasan Wisata Candi Borobudur : sebuah gerbang dengan 2 singa di sisi kiri kanan.

Mengapa bisa demikian? Mengapa singa bukan stupa? ❑

***Yanuar,** Jl Yos Sudarso Lubuklinggau*

Berapa Banyak Uang 'Dibakar'?

BERSILATURAHMI mengunjungi saudara bahkan kerabat saat Idul Fitri 1443 H, membuat hati saya merasa miris. Bagaimana tidak? Di tengah kesulitan hidup ada sekelompok orang yang dengan gembira, 'membakar uang' dengan membunyikan mercon. Bahkan dalam perjalanan menuju arah Semarang dengan melewati Magelang, kami harus menghentikan kendaraan ketika melewati Jl Soekarno Hatta tepatnya di simpangtiga setelah Terminal Magelang (yang ke kiri arah kota dan ke kanan arah Kopeng) ada yang sengaja membunyikan mercon di tengah jalan. Ya, di tengah jalan.

Masya Allah. Ketika kami bisa lewat dan terlihat dengan tertawa bangga seorang lelaki mengangkat kembali mercon yang hendak dibunyikan itu, setinggi 40cm, diameter sekitar 20cm. Padahal di tengah jalan sudah sangat penuh kertas bertebaran. Ini betul-betul membuat miris, karena tidak ada yang melarang. Bahkan seakan menjadi tontonan. ❑

***Farchan,** Jl Kutai VII Solo*

Pojok KR

Lebaran, destinasi wisata di DIY diserbu pengunjung.

-- Jangan lupa keselamatan pengunjung.

***

UMKM naik kelas, sinergi dalam peningkatan mutu produk.

-- Tapi masih butuh insentif pemerintah.

***

Songsong bonus demografi 2030, jaga kesehatan 'Generasi Emas'.

-- Persiapkan dari sekarang.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Wakil : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd, Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.